



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024



Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Jl.Cut Nyak Dien No.6 Pekanbaru
Telp. 0761- 47153

www.disbun.riau.go.id



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.E. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR 31

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau disusun sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu satu tahun anggaran, yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini dilaksanakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *existing*, evaluasi pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencaian RENSTRA Perangkat Daerah

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review terhadap RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	49
3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V PENUTUP	63



LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Daerah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau (T-C.29)	16
Tabel	2.2	Tabel Pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan (T-C.30)	24
Tabel	2.4	Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau (T-C.31)	41
Tabel	3.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 (T-C.32)	46
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Perkebunan antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Kabupaten /Kota Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 (T-C.33)	59
Tabel	4.1	Rincian Anggaran Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024	62



PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan



perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Di sisi lain, Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang dalam fungsinya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka pembangunan perkebunan ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara integrative dengan dokumen- dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan Provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan.

Sebagaimana dapat dilihat pembangunan pertanian khususnya sub sektor perkebunan secara umum terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah, namun dalam pengembangan tanaman perkebunan di Provinsi Riau masih belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani serta keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang

besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB.

Sejalan dengan semangat reformasi, perencanaan dan penganggaran dasar serta otonomi daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Riau dituntut untuk mengubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan perkebunan. Program dan kegiatan pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta maupun *stake holders* (pemangku kepentingan) lainnya. Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Provinsi Riau serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2019 - 2024. Sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Riau, Visi pembangunan pertanian / perkebunan harus selaras dengan visi Provinsi Riau yaitu **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”**, Visi tersebut merupakan cita-cita masyarakat Riau untuk mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing, sejahtera dengan meningkatnya pendapatan dan berkurangnya kemiskinan, bermartabat dan berintegritas serta unggul dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2024 sehingga tujuan

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

[illegible]

4

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

14. Keputusan Permendagri No. 050- 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
20. Peraturan Gubernur Riau No 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program Dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
21. Peraturan Gubernur Riau No 31 tanggal 14 Juli Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024
22. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

➤ MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan/sub Kegiatan pembangunan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam RK Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

➤ TUJUAN

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub Kegiatan pembangunan perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/sub Kegiatan pembangunan perkebunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan sesuai surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau nomor : 050/BAPPEDALITBANG-Bid I/0526 tanggal 18 Juli 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja



- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
- 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
- 2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
- 2.1.7 Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.29
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK
 - 2.2.2 Lampiran tabel berikut T-C.30
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- 2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)
- 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
- 2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
- 2.4. Review terhadap RKPD
Berisi uraian mengenai :
 - 2.4.1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
 - 2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
 - 2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
 - 2.4.4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
 - 2.5.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2.5.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2.5.3. Lampiran tabel T-C.32

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

3.3.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

3.3.3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

3.3.4. Lampiran tabel T-C.33

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Diambil dari Sistem SIPD pada Tahapan Final RKPD

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup :

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaanya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3. Rencana tindak lanjut
- 5.4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024
2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja Perangkat Daerah
3. Hasil Pemetaan program dan kegiatan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Permendagri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2022

BAB II

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau. maka terhitung untuk Tahun 2021 terjadi beberapa perubahan dalam susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Perkebunan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk. Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan pemisahan dari fungsi pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dengan proses pemisahan Perangkat Daerah ini maka terjadi penyesuaian pada dokumen perencanaan dan penganggarannya, termasuk didalamnya terjadi perubahan pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan yang merupakan salah satu landasan dalam penyusunan Renja PD.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pencapaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Riau (berdasarkan Renstra Tahun 2019 – 2024) dapat dilihat pada Tabel.1 (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel T.C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) s/d Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	Persen		100	100	100.00	100	100	100.00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5	laporan		1	1	100.00	1	1	100.00
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	412	Orang		110	110	100.00	103	103	100.00
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola	28	laporan		1	1	100.00	7	7	100.00
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan		1	1	100.00	7	7	100.00
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	1	laporan		1	1	100.00	160	160	100.00
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	626	Paket		154	154	100.00	160	160	0.00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	20	Jenis layanan		5	5	100.00	5	5	100.00
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57	Paket		15	15	100.00	15	15	100.00
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	173	Paket		30	30	100.00	35	35	100.00
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		5526	5,526	100.00	3	3	100.00
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	126	Paket		28	28	100.00	28	28	100.00
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	725	Laporan		137	137	100.00	175	175	100.00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	192	Unit		29	29	100.00	38	38	100.00
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	192	Unit		29	29	100.00	38	38	100.00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	12	Laporan			-		3	3	100.00
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1351	Laporan		1051	1,051	100.00	100	100	100.00
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan		13	13	100.00	12	12	100.00
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2827	Laporan		924	924	100.00	924	924	100.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) s/d Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	117	Unit		32	30	93.75	35	35	100.00
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41	Unit		13	13	100.00	13	13	100.00
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	Unit		15	12	80.00	15	15	100.00
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	Unit		1	1	100.00	7	7	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja								96.25 Tinggi			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan	8,822,314	Ton		8,630,387	9,227,178	106.91	-	0	0.00
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)	75	Ha		-	-	-	-	0	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan		-	-	-	1	1	0.00
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah bibit perkebunan	650.750	bibit		147,750	147,750	100.00	225,000	225000	100.00
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan)	Jumlah Sertifikat Benih	173000	Sertifikat		40,000	40,000	100.00	40,000	40000	100.00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3	laporan		49,700	49,700	100.00	1	1	100
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3	laporan		15,000	15,000	100.00	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja								100.00 Sangat Tinggi			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan	12.730	kg/ha/th		12,609	11,932	94.63	12.730	12.730	100.00
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang ditanam	1080	Ha		405	405	100.00	290	290	100.00
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	100	Dokumen		-	-	-	100	100	0.00
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	8	Dokumen		0	-	-	4	4	0.00
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	11	Dokumen		3.3	3	100.00	3	3	100.00
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3	laporan		12	12	100.00	1	1	100.00
3.27.03.1.01.10	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya (DAK UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Jumlah gedung UPTD/balai serta sarana pendukungnya yang dibangun dipelihara dan di rehabilitasi	3	Unit		0	-	-	1	1	0.00
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja								100.00 Sangat Tinggi			

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) s/d Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	0.3	Persen		0.1	0.15	150.00	0.3		
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas lahan yang dikendalikan	480	Ha		100	100	100.00	140	140	100.00
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	480	Ha		100	100	100.00	100	100	100.00
3.27.05.1.01	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan penanganan kebakaran lahan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	400	Ha		0	-	-	40	40	0.00
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja								100.00 Sangat Tinggi			
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	73.81	Persen		66.95	64.53	96.39	73.81		
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan	4	laporan		12	12	100.00	1	1	100.00
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlahizin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4	laporan		12	12	100.00	1	1	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja								100.00 Tinggi			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	2.15	Persen		1.78	1.81	101.69	2.15		
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya	140	Orang		8	8	100.00	140	140	
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	20	orang		0	-	-	20	20	
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluhan pertanian swadaya dan swasta yangt elah mengikuti pengembangan kompetensi	390	orang		8	8	100.00	120	120	100.00
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi	5	Kelompok		50	50	100.00	5	5	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi Informasi Teknis Sosial ekonomi dan inovasi pertanian	1	Dokumen		0	-	-	1	1	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	12	Kelompok		50	50	100.00	4	4	100.00
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen	10	Unit		0	-	-	10	10	
3.27.07.1.03.02	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	20	Unit		1	1	100.00	10	10	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja								100.00 Sangat Tinggi			

Dari tabel 1 (T-C.29) dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Dengan target 15 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara, pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 12 unit atau sebesar 80,00%

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih

Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 59.476.760,- atau 64,04%, yang dilaksanakan hanya 32.000 label dari yang ditargetkan sebanyak 40.000 label disebabkan kegiatan Rapat Konsolidasi Forum Perbenihan Perkebunan tidak dilaksanakan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022 yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dengan target 1 persen sudah terealisasi sebanyak 1 persen atau sebesar 100 %

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Dengan target 154 stel sudah terealisasi sebanyak 154 stel atau sebesar 100%

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan target 15 jenis sudah terealisasi sebanyak 15 jenis atau sebesar 100%

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan target 30 jenis sudah terealisasi sebanyak 30 jenis atau sebesar 100%

5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dengan target 5.526 porsi sudah terealisasi sebanyak 5.526 porsi atau sebesar 100%

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dengan target 28 jenis sudah terealisasi sebanyak 28 jenis atau sebesar 100%

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dengan target 137 kali sudah terealisasi sebanyak 137 kali atau sebesar 100%

8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dengan target 29 unit sudah terealisasi sebanyak 29 unit atau sebesar 100%

9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan target 1.051 surat sudah terealisasi sebanyak 1.051 surat atau sebesar 100%

10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan target 13 rekening sudah terealisasi sebanyak 13 rekening atau sebesar 100%

11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan target 924 OB sudah terealisasi sebanyak 924 OB atau sebesar 100%



12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Dengan target 13 unit sudah terealisasi sebanyak 13 unit atau sebesar 100%
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
Dengan target 49.700 Bibit sudah terealisasi sebanyak 49.700 Bibit atau sebesar 100%
 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
Dengan target 15.000 Bibit sudah terealisasi sebanyak 15.000 Bibit atau sebesar 100%
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
Dengan target 3,3 Km sudah terealisasi sebanyak 3,3 Km atau sebesar 100%
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Dengan target 12 unit sudah terealisasi sebanyak 12 unit atau sebesar 100%
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Dengan target 100 Ha sudah terealisasi sebanyak 100 Ha atau sebesar 100%

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Dengan target 12 Perusahaan sudah terealisasi sebanyak 12 Perusahaan atau sebesar 100%

f. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta

Dengan target 8 Lembaga sudah terealisasi sebanyak 8 Lembaga atau sebesar 100%

2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Dengan target 50 orang sudah terealisasi sebanyak 50 orang atau sebesar 100%

3. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Dengan target 1 koorporasi sudah terealisasi sebanyak 1 koorporasi atau sebesar 100%

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022 tidak ada yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022, sebagai berikut :

- Pagu kegiatan yang tersedia di APBD jauh berkurang jika dibandingkan dengan pagu indikatif kegiatan di Renstra sehingga target kinerja sesuai di Renstra menjadi tidak dapat tercapai.

- Terjadinya pengurangan pagu anggaran berdampak pada pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan pada Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2022 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja)

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dengan tidak tersedianya anggaran menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan tentu saja memberikan implikasi pada capaian program renstra dimana target yang sudah ditetapkan di Renstra tidak dapat tercapai. Dengan tidak tercapainya target maka tujuan dan sasaran strategis dinas juga akan sulit tercapai. Dan secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian Visi Misi gubernur.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan

fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

2. Memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

4. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Dari tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Perkebunan selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau yaitu pada Misi ke 3 (Tiga) yaitu **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing** dan Misi ke 5 (Lima) yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.**

Adapun tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perkebunan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel.2 (T-C.30)

Tabel pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan

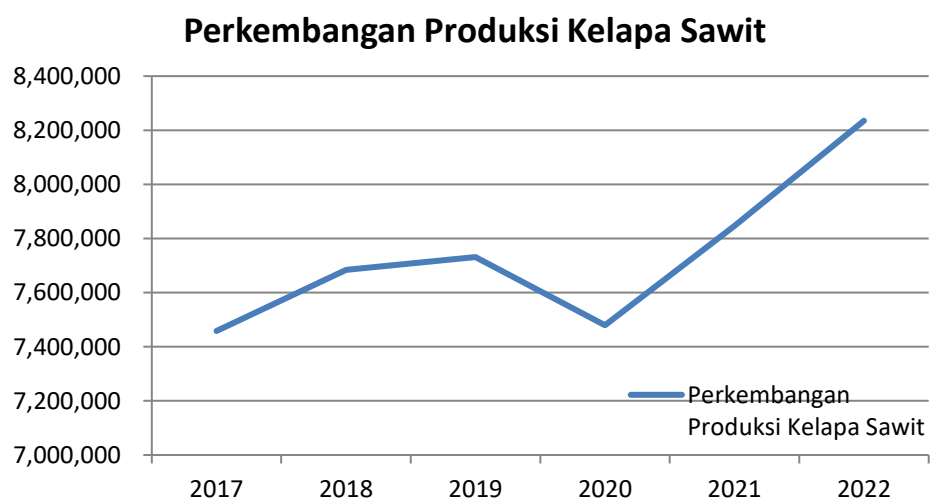
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ctt Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Produksi Utama Perkebunan											
1	Kelapa sawit (ton CPO)	-	-	7.447.941	7.541.787	7.626.838	7.733.114	7,663,501	8.235.040	-	-	-
2	Kelapa (ton Kopra)	-	-	396.400	396.500	396.600	396.700	394,983	393.732	-	-	-
3	Karet (ton karet kering)	-	-	426.500	426.600	426.700	426.800	435,123	331.708	-	-	-
4	Sagu (ton tepung sagu)	-	-	265.400	265.500	265.600	265.700	0	266.698	-	-	-
	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan											
5	Kelapa Sawit (Kg/Ha/Th CPO)	-	-	3.469	3.504	3.539	3.574	1,171	-	-	-	-
6	Kelapa (Kg/Ha/Th Kopra)	-	-	1.415	1.430	1.445	1.460	1,252	-	-	-	-
7	Karet (Kg/Ha/Th Karet Kering)	-	-	1.216	1.220	1.225	1.230	6,340	-	-	-	-
8	Sagu (Kg/Ha/Th Tepung Sagu)			6.390	6.395	6.400	6.405	0	-			
9	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	0.01	1.78	1.96	2.15	0	1.81	-	-	-

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK

Dari tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

- ❖ Capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2022 sebesar 8.235.040 ton CPO atau capaian kinerjanya 106,49% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2021 yaitu sebesar 7,845,071 ton CPO atau capaian kinerja sebesar 97.19%. Perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa sawit dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini :

Grafik 1
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit
Tahun 2017 s/d 2022



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi kelapa sawit dalam 5 tahun terjadi fluktuasi, penurunan produksi pada tahun 2020 disebabkan kebun kelapa sawit yang kurang produktif lagi karena tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau banyak yang sudah tua dan perlu adanya peremajaan, sampai dengan Tahun 2021 jumlah TTR tanaman kelapa sawit sebanyak 43.691 (Statistik Angka Tetap Tahun 2021)

- ❖ Capaian realisasi produksi kelapa tahun 2022 sebesar 393.732 ton kopra atau capaian kinerjanya 99,30% lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi kelapa tahun 2021 yaitu sebesar 394.983 ton kopra, namun demikian produksi masih relatif stabil, hampir sama dengan produksi tahun lalu, kenaikan produksi tidak signifikan bila dibandingkan tahun lalu. Perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini :

Grafik 2
Perkembangan Produksi Kelapa
Tahun 2017 s/d 2021

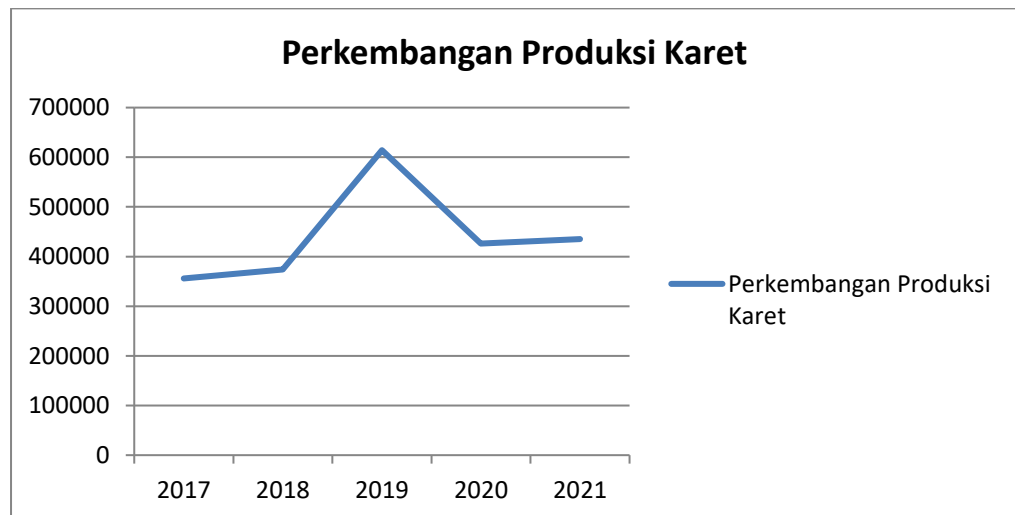


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi kelapa cenderung stabil, namun pada tahun 2022 luas tanaman kelapa menurun dan bertambahnya luas tanaman tua rusak seluas 243 ha. Peningkatan produksi disebabkan adanya peningkatan produktivitas dari 1.214 kg/ha/th pada tahun 2021 menjadi 1.232 kg/ha/th pada tahun 2022

- ❖ Capaian realisasi produksi karet tahun 2022 sebesar 331.708 ton karet kering atau capaian kinerjanya 77,75% lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi karet tahun 2021 yaitu sebesar 409.918 ton karet kering. Perkembangan Capaian realisasi produksi karet dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini :

Perkembangan Capaian realisasi produksi karet dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini :

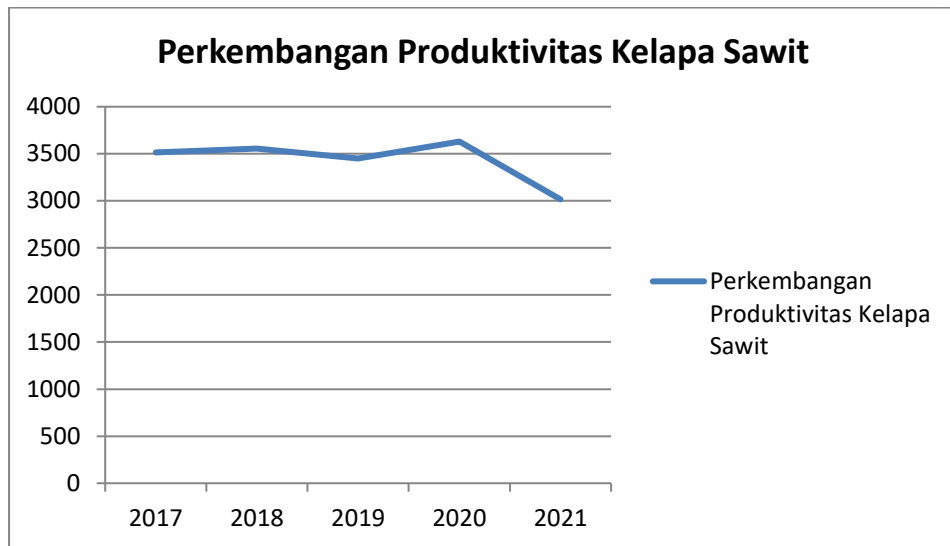
Grafik 3
Perkembangan Produksi Karet
Tahun 2017 s/d 2021



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi karet cenderung mengalami penurunan produksi karena luas areal jauh berkurang karena banyaknya terjadi alih komoditi menjadi kelapa sawit dan juga alih fungsi lahan.

- ❖ Capaian realisasi produktivitas kelapa sawit tahun 2021 sebesar 3,016 ton CPO atau capaian kinerjanya 86,07% lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi produktivitas tahun 2020 yaitu sebesar 3,192 ton CPO atau capaian kinerjanya 92,01%, hal ini disebabkan karena mahalnya harga saprodi (pupuk) sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknisnya sehingga produktivitas perkebunan rakyat menurun selain itu banyaknya tanaman tua rusak (TTR) dimana sampai dengan Tahun 2021 jumlah TTR tanaman kelapa sawit sebanyak 43.691 (Statistik Angka Tetap), hal ini menyebabkan berkurangnya produktivitas tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Perkembangan Capaian realisasi produktivitas kelapa sawit dapat dilihat pada grafik 4 di bawah ini :

Grafik 4
Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit
Tahun 2017 s/d 2021

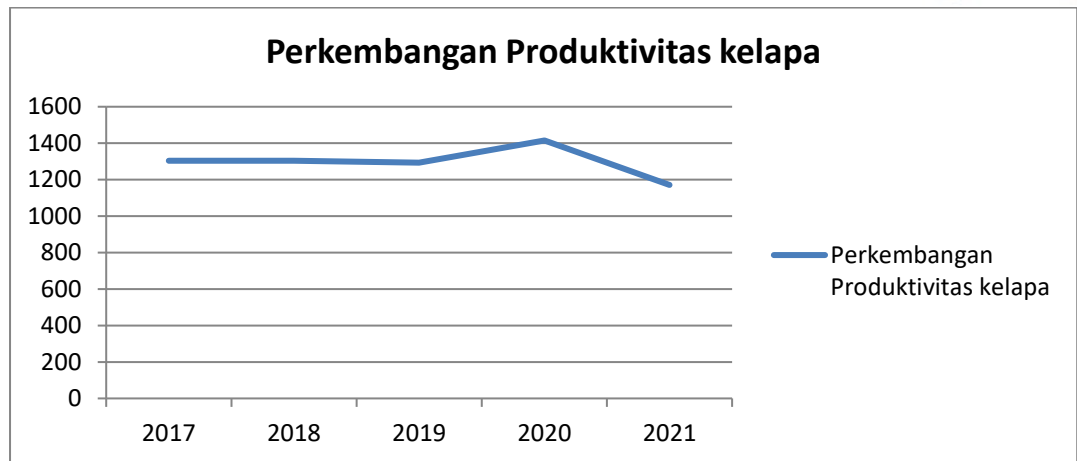


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi produktivitas kelapa sawit tahun 2021 sebesar 3.016 kg/ha/th atau capaian kinerja 86.07% atau tidak mencapai target yaitu sebesar 3.504 kg/ha/th , namun dibandingkan dengan capaian tahun 2020 realisasi produktivitas mengalami penurunan , hal ini disebabkan mahalnya harga saprodi yang menjadi faktor pendukung tingginya produktivitas tanaman rakyat, sehingga kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknis yang dianjurkan sehingga produktivitas perkebunan rakyat menurun dan banyak dalam kategori tanaman tua rusak dan perlu adanya peremajaan sehingga produktivitasnya dapat meningkat kembali.

- ❖ Capaian produktivitas tanaman kelapa Tahun 2021 sebesar 1.297 kg/h/th dan dikategorikan rendah atau mencapai 90,69%.hal ini disebabkan karena petani tidak melakukan pemeliharaan sesuai teknis dan banyak tanaman kelapa di Provinsi Riau dala kategori Tanaman Tua Rusak.

Perkembangan Capaian realisasi produktivitas tanaman kelapa dapat dilihat pada grafik 5 di bawah ini :

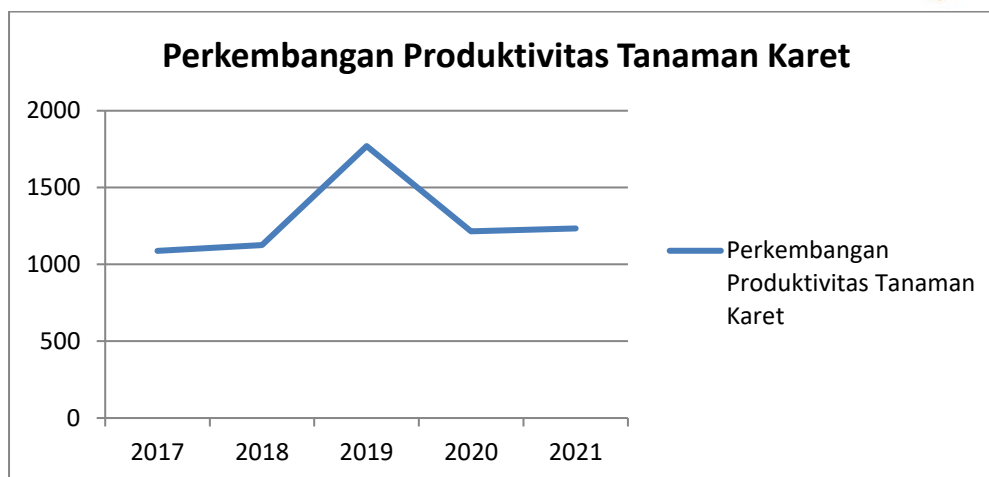
Grafik 5
Perkembangan Produktivitas Kelapa
Tahun 2017 s/d 2021



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas kelapa berfluktuatif, pada tahun 2020 produktivitas kelapa mengalami kenaikan namun pada tahun 2021 produktivitas kelapa terjadi penurunan, ini berarti pada tahun 2020 dimana terjadinya pandemi covid-19 petani kelapa melakukan pemeliharaan dan perawatan kebunnya untuk menopang pendapatan keluarga.

- ❖ Capaian realisasi produktivitas karet tahun 2021 sebesar 1.232 kg/ha/th karet kering atau capaian kinerjanya 101.05% lebih tinggi jika dibandingkan dengan target produktivitas tahun 2021 yaitu sebesar 1.220 kg/ha/th karet kering, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi akibat perubahan cuaca/klim yang baik sehingga produksi meningkat. Perkembangan Capaian realisasi produktivitas karet dapat dilihat pada grafik 6 di bawah ini :

Grafik 6
Perkembangan Produktivitas Karet
Tahun 2017 s/d 2021

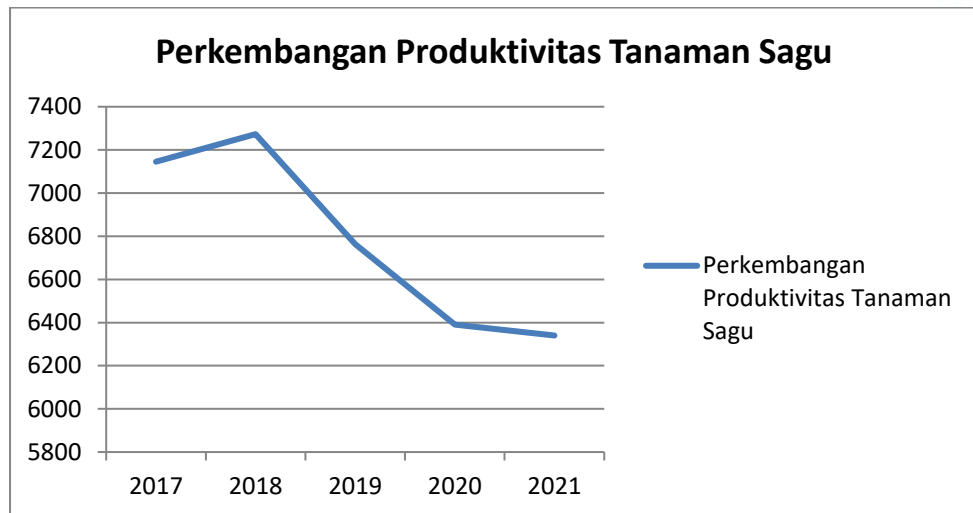


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas karet cenderung menaik karena terpeliharanya kebun karet rakyat dengan baik

- ❖ Capaian realisasi produktivitas sagu tahun 2021 sebesar 6,345 kg/ha/th tepung sagu atau capaian kinerjanya 82,44% lebih rendah jika dibandingkan dengan target capaian realisasi produktivitas yaitu sebesar 6,395 kg/ha/th tepung sagu, hal ini disebabkan karena banyaknya tanaman tua rusak dan tidak terpelihara dengan baik. Selain itu capaian produktivitas tanaman sagu tidak dapat dibandingkan dengan produktivitas tahun 2020 karena produktivitas tanaman sagu pada tahun 2020 tidak ada target kinerjanya sehingga tidak dapat dibandingkan.

Perkembangan Capaian realisasi produktivitas sagu dapat dilihat pada grafik 6 di bawah ini :

Grafik 7
Perkembangan Produktivitas Sagu
Tahun 2017 s/d 2021



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas sagu cenderung menurun karena banyaknya tanaman tua rusak dan tidak terpelihara dengan baik

- ❖ Untuk Capaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Perkebunan provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 0.01 % yang didukung oleh kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan ekonomi; mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, memunculkan daerah pusat-pusat pertumbuhan baru di desa-desa pelosok, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian di Provinsi Riau berjalan dengan cukup pesat.

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sub sektor perkebunan di Provinsi Riau, sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 61 Tahun 2021 maka Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada urusan perkebunan, dengan melakukan pelayanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Agar pelaksanaan urusan perkebunan yang diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat mendukung misi Pemerintah Daerah, diperlukan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan kabupaten/kota se-provinsi Riau yang membidangi perkebunan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta melakukan perumusan kebijakan dan melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih banyak ditemui permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau perlu ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dijadikan isu

strategis Dinas Perkebunan. Adapun Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

Kekuatan (*strenghts*):

1. Tersedianya Sumberdaya manusia;
2. Tersedianya sumberdaya lahan;
3. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi);
4. Tersedianya komoditas tanaman perkebunan untuk pemenuhan pangan dan industri;
5. Tersedianya peraturan/per Undang-undangan;
6. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan.

Kelemahan (*weakness*):

1. Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum optimal;
2. Infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan yang belum memadai;
3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal;
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah;
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

Peluang (*opportunities*):

1. Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah.

Tantangan (*threats*):

1. Produksi/produktivitas tanaman perkebunan masih rendah;
2. Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat;
3. Pengusaan teknologi pertanian masih rendah;
4. Isu lingkungan hidup dan globalisasi;
5. Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas;
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas.

Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, bila program dan kegiatan yang diemban Dinas Perkebunan Provinsi Riau tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan Dinas Perkebunan mendukung terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan



berdaya saing. Dinas Perkebunan mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan perkebunan dalam pencapaian masyarakat sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan Nilai Tambah Usaha Perkebunan (NTUP) , menurunnya emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan investasi daerah, dan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro seperti pendapatan domestik bruto, neraca perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja rakyat menunjukkan trend positif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimasi penggunaan lahan dan memanfaatkan inovasi teknologi.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya,



menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat

7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mechanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Dinas Perkebunan berbagai tantangan dan peluang sebagai berikut :

➤ **Tantangan**

- a) Semakin tingginya alih fungsi lahan
- b) Menurunnya kesuburan tanah pertanian
- c) Kondisi jaringan irigasi tidak memadai
- d) Anomali Iklim
- e) Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat pertanian)
- f) Terbatasnya modal petani
- g) Penerapan teknologi terbatas
- h) Daya saing produksi masih rendah
- i) Tingkat kehilangan hasil masih tinggi
- j) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih rendah
- k) Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana produksi
- l) Isu lingkungan hidup dan globalisasi
- m) Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah (NTP < 100)

➤ **Peluang**

- a) Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- b) Posisi wilayah Riau yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional dan internasional
- c) Pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terbuka luas
- d) Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik di Provinsi Riau
- e) Kebijakan pemerintah yang sangat mendukung
- f) Banyaknya sektor swasta tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau
- g) Infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, komunikasi) semakin baik
- h) Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir (bioindustri dan bioenergi)
- i) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
- j) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif
- k) Meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pangan
- l) Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah

Dari isu-isu strategis baik faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka isu-isu penting yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 adalah melakukan peningkatan produksi /produktivitas tanaman perkebunan dengan melaksanakan program peningkatan mutu, produksi dan produktivitas hasil perkebunan dengan melakukan kegiatan intensifikasi,



diversifikasi, peremajaan dan pembangunan tanaman perkebunan dan pembinaan mutu hasil dengan melaksanakan pengendalian hama penyakit (OPT), normalisasi saluran drainase serta penatausahaan perizinan usaha perkebunan

Selain itu juga melakukan peningkatan pemberdayaan kelembagaan penyuluh perkebunan dengan melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pengawasan penyuluh perkebunan

2.4. Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD merupakan proses membandingkan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Tahun 2024 dengan hasil pencermatan Badan Pembangunan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau dengan analisis kebutuhan perencanaan perkebunan.

Review terhadap Rancangan RKPD dilakukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan rencana program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2024 yang dibahas bersama dengan Badan Pembangunan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau

Dengan terbitnya hasil pmutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019, Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pencermatan kembali bersama Tim TAPD dalam hal ini Bappedalitbang Provinsi Riau Bidang II melakukan penyesuaian hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pmutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019. Kegiatan ini disebut dengan pmutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019

Selanjutnya dilakukan pemetaan pemutakhiran program dan kegiatan sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemetaan pemutakhiran program dan kegiatan Renstra. Semua proses pemutakhiran ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang dientry alamat web <https://sipd.go.id>

Review pada rancangan rencana kerja dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah terjadi disebabkan antara lain karena pergeseran anggaran, penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, penyesuaian anggaran dalam rekening belanja barang dan jasa belanja perjalanan dinas, belanja modal dan belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dan adanya masukan usulan dari DPRD.

Adapun pendanaan indikatif pembangunan perkebunan yang ada pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan Bappedalitbang sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024 yaitu tabel 3 (Tabel T-C.31) Review terhadap Rancangan RKPD Dinas Perkebunan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel T.C. 31
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

KODE				RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KIENRJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATOR		
(3)				(4)	(5)	(6)		(12)		(13)	(4)	(5)	(6)		(12)		(13)
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					43,038,052,189		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROVINSI RIAU	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	8,822,314	Ton	5,478,163,153	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROVINSI RIAU	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	8,822,314	Ton	5,478,163,153		
3	27	02	101	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Luas Lahan yang difasilitasi (Pupuk, Pestisida dan Alsintan)	75	Ha	166,048,860	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan) (Ha)	75	Ha	166,048,860		
3	27	02	101	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	166,048,860	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	166,048,860		
3	27	02	102	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Bibit Perkebunan	225,000	bibit	5,312,114,293	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Bibit Perkebunan	225,000	bibit	5,312,114,293		
3	27	02	102	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	40,000	Sertifikat	427,283,620	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Jumlah Sertifikat Benih	40,000	Sertifikat	427,283,620		
3	27	02	102	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Bidang Disbun)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	2,754,830,468	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	2,754,830,468		
3	27	02	102	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	2,130,000,205	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	2,130,000,205		
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan	12.73	kg/ha/th	9,837,416,517	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan	12.73	kg/ha/th	9,837,416,517		
3	27	03	101	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Luas Kebun yang ditanam	290	Ha	9,837,416,517	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Luas Kebun yang ditanam	290	Ha	9,837,416,517		
3	27	03	101	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	100	Dokumen	-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	100	Dokumen	-		
3	27	03	101	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4	Dokumen	6,327,524,937	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	7	Dokumen	6,327,524,937		
3	27	03	101	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3	Dokumen	1,782,623,860	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	3	Dokumen	1,782,623,860		
3	27	03	101	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	Laporan	1,727,267,720	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	Laporan	1,727,267,720		
3	27	03	101	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1	Unit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Dirhabilitasi	1	Unit	-		
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana	0.3	Persen	647,536,250	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana	0.3	Persen	647,536,250		
3	27	05	101	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Lahan yang dikendalikan	140	Ha	647,536,250	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas Lahan yang dikendalikan	140	Ha	647,536,250		
3	27	05	101	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	Ha	131,310,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	Ha	131,310,000		
3	27	05	101	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40	Ha	516,226,250	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40	Ha	516,226,250		
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin	73.81	Persen	749,216,000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin	73.81	Persen	749,216,000		
3	27	06	101	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi Penerapan Izin Usaha Perkebunan	1	Laporan	749,216,000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi Penerapan Izin Usaha Perkebunan	1	Laporan	749,216,000			
3	27	06	101	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	Laporan	749,216,000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan izin usaha pertanian		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	1	Laporan	749,216,000		
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya	2.15	Persen	775,001,390	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya	2	Persen	775,001,390		

KODE					RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KIENRJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	
(3)					(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	
3	27	07	101		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan Kompetensinya	140 Orang	211,695,760	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan Kompetensinya	140 Orang	211,695,760	
3	27	07	101	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	135,453,890	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	135,453,890	
3	27	07	101	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	76,241,870	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	76,241,870	
3	27	07	102		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi	5 Kelompok	118,899,980	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi	5 Kelompok	118,899,980	
3	27	07	102	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	-	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	
3	27	07	102	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	4 Kelompok	118,899,980	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan	4 Kelompok	118,899,980	
3	27	07	103		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Koorporasi yang mendapat Pembinaan Manajemen	10 Unit	444,405,650	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Koorporasi yang mendapat Pembinaan Manajemen	10 Unit	444,405,650.20	
3	27	07	103	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	444,405,650	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	444,405,650.20	
3	27	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang perkebunan	100	25,550,718,878				100	-	25,550,718,878
3	27	1	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	5 Laporan	19,313,197,850	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	5 Laporan	19,313,197,850	
3	27	1	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	19,313,197,850	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	19,313,197,850	
3	27	1	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yang dikelola	7 Laporan	48,273,750	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yang dikelola	7 Laporan	48,273,750	
3	27	1	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	48,273,750	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	48,273,750	
3	27	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Kehadirnan ASN	1 laporan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Kehadirnan ASN	-	-	-
3	27	1	105	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
3	27	1	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	5 Jenis layanan	1,685,170,352	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	5 Jenis layanan	1,685,170,352	
3	27	1	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	185,327,585	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	185,327,585	
3	27	1	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	360,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	360,000,000	
3	27	1	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	162,018,826	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	162,018,826	
3	27	1	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	87,545,441	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	87,545,441	
3	27	1	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	890,278,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	890,278,500	
3	27	1	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	38 Unit	626,044,105	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	38 Unit	626,044,105	
3	27	1	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	626,044,105	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	626,044,105	
3	27	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	2,853,366,007	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	2,853,366,007	
3	27	1	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	12,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	12,500,000	
3	27	1	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435,619,956	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435,619,956	
3	27	1	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	924 Laporan	2,405,246,051	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	924 Laporan	2,405,246,051	

KODE					RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KIENRJA		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	
3	27	(3)	1	109	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)	
3	27				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		35	Unit	1,024,666,814		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		35	Unit	1,024,666,814
3	27		1	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	Unit	417,610,000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		13	Unit	417,610,000
3	27		1	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	54,380,000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15	Unit	54,380,000
3	27		1	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	300,625,000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7	Unit	552,676,814
											43,038,052,189				-	-	43,038,052,189

Dari tabel 3 (Tabel T-C.31) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendanaan indikatif pembangunan perkebunan yang ada pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan Bappedalitbang sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024, dan usulan dari DPRD Provinsi Riau
- Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024 sesuai renstra memiliki total anggaran sebesar Rp 37.400.132.962,- (Tiga Puluh tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
- Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024 dengan mengacu pada Surat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDALITBANG-1/12/12 Tentang Penyesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2023 memiliki total anggaran sebesar Rp. 43.038.052.189; (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri yang terdiri atas :

- ✓ Belanja Pegawai sebesar Rp. 19.313.197.851,-
(Sembilan belas Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)
- ✓ Belanja Pembangunan sebesar Rp. 23.724.854.338,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 25.550.718.878,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Delapan Rupiah)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2024

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 5.478.163.153 ,- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 9.587.416.517 ,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah)
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 647,536,250,- (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 749,216,000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
- Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 775,001,390,20 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Koma Dua Puluh Rupiah)
- Adapun rincian anggaran untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, akan diinput pada aplikasi *sipd.go.id* Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan usulan program dan kegiatan masyarakat ini berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergis dengan dokumen perencanaan.

Dalam memperoleh usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan

pertemuan Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Forum Perangkat Daerah ini merupakan wadah penampung dan penjarangan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), serta wahana antar pihak-pihak lain yang langsung atau tidak langsung guna penyusunan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2024.

Forum Perangkat Daerah adalah tahapan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum yang sangat penting guna menciptakan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut telah diakomodasi didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Provinsi Riau yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian sub sektor perkebunan dan masih mengandalkan sub sektor ini sebagai penopang

perekonomian daerah, sudah barang tentu sangat mendukung dan berkepentingan dalam forum ini sebagai media untuk memfasilitasi dan mengakomodasikan kemampuan dan keperluan Kabupaten/Kota dan Provinsi, khususnya dalam mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka memantapkan Pembangunan perkebunan guna mendukung visi dan misi Gubernur Riau.

Pertemuan Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023 tersebut merupakan sarana mengintegrasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan di daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024 dirumuskan dalam satu berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Pertemuan Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi Riau dan bahan pemutakhiran pada Musrengbang RKPD Provinsi Riau tahun 2024. Berikut ini disajikan tabel 4 (TC.32) yaitu tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024.

TABEL 4 (T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

No	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	BESARAN / VOLUME		CATATAN PENTING
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					Kabupaten/Kota untuk dapat mencermati hal sebagai berikut :
A	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH					* Lokasi dipastikan tidak termasuk kedalam kawasan
A.I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					* Lokasi harus disertai titik Koordinat
A. I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					* Kelompok tani terdaftar di SIMLUHTAN
A. I.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disbun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	Orang	
A. I.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
A. I.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disbun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	
A. I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
A. I.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disbun	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	
A. I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
A. I.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disbun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	
A. I.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	Paket	
A. I.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disbun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	
A. I.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disbun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	
A. I.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Laporan	
A. I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
A. I.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	

No	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	BESARAN / VOLUME		CATATAN PENTING
A. I.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Laporan	
A. I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
A. I.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disbun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	
A. I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
A. I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disbun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	Unit	
A. I.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disbun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	
A. I.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
B.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
B.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					
B.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	
B.1.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah peredaran benih perkebunan			
B.1.2.1	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Prov Riau	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	
B.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
B.2.1	Penataan Prasarana Pertanian					

No	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	BESARAN / VOLUME		CATATAN PENTING
B.2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Prov Riau	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	7	Dokumen	
B.2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Prov Riau	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	7	Dokumen	
B.2.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prov Riau	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	Laporan	
B.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
B.3.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					
B.3.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Prov Riau	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100	Ha	
B.3.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Prov Riau	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40	Ha	
B.4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
B.4.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
B.4.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Prov Riau	Terbina dan terawasnya penerapan standar dan izin usaha pertanian	1	Laporan	
B.5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
B.5.1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					
B.5.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Prov Riau	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50	Orang	

No	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	BESARAN / VOLUME		CATATAN PENTING
B.5.2.1	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	120	Orang	
B.5.3	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Prov Riau				
B.5.3.1	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Prov Riau	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	4	Kelompok	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Prov Riau				
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Prov Riau	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	10	Unit	

No	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	BESARAN / VOLUME		CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
C.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
C.1.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah peredaran benih perkebunan			
C.1.1.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	UPT Produksi Benih Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	

No	Program / Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	BESARAN / VOLUME		CATATAN PENTING
Sub Unit : UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
D.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
D.1.1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah peredaran benih perkebunan			
D.1.1.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Prov Riau	Jumlah Sertifikat Benih	12.5 juta	Sertifikat	

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pencapaian Visi **“TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia** yang terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis
2. **Pembangunan Infrastruktur**, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian

3. **Menyederhanakan Regulasi**, yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. **Menyederhanakan Birokrasi**, melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi
5. **Transformasi Ekonomi**, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa

Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya pembangunan Perkebunan Provinsi Riau diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Transformasi Ekonomi. Ada 5 pilar dalam transformasi Ekonomi Indonesia yaitu (1) optimalisasi pembangunan infrastruktur, (2) penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, (3) minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, (4) efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta (5) konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan.

Kelima pilar yang dibangun saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan sebagai landasan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju 2024. Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur, Kedua, implementasi pemerataan ekonomi antara lain dilakukan dengan reformasi agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit, Ketiga, Indonesia perlu meminimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek dalam rangka mengatasi saving-investment gap, Keempat, pasar tenaga kerja perlu diefisienkan dan ditingkatkan SDM-nya, Kelima investasi yang masuk perlu dikonfigurasi



untuk mendukung pertumbuhan dan memangkas *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR).

Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya pembangunan Perkebunan Provinsi Riau diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Transformasi Ekonomi pada pilar Kedua, implementasi pemerataan ekonomi antara lain dilakukan dengan reformasi agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit. Bila ditelaah Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2024 dengan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 terdapat keselarasan antara program dan kegiatan di Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2020 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang melaksanakan salah satu urusan pilihan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan

tugas pembantuan bidang perkebunan sesuai dengan kewenangan Provinsi

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 , maka Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendukung Misi 3 (Tiga) dan Misi 5 (Lima) Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAUBERSATU)

MISI 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing

Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran: Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan

MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel.5 berikut :

Tabel. 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024
(IKU DINAS PERKEBUNAN)

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)					
				2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir Tahun 2024
1.	Terwujudnya peningkatan kinerja OPD	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	66,92 (B)	67,59 (B)	68,29 (B)	69,09 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)
2.	Meningkatkan pendapatan petani perkebunan	Meningkatnya sarana produksi pengembangan perkebunan	Jumlah produksi Komoditas Utama Perkebunan	8.443.280	8.536.241	8.630.387	8.715.738	8.822.314	8.822.314
			- Kelapa sawit (ton CPO)	7.355.217	7.447.941	7.541.787	7.626.838	7.733.114	7.733.114
			- Kelapa (ton kopra)	396.373	396.400	396.500	396.600	396.700	396.700
			- Karet (ton Karet Kering)	426.391	426.500	426.600	426.700	426.800	426.800
			- Sagu (ton tepung sagu)	265.299	265.400	265.500	265.600	265.700	265.700
		Meningkatnya sarana produksi pengembangan perkebunan	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan	12.490	12.549	12.609	12.669	12.730	12.730
			- Kelapa sawit (kg/ha/ton CPO)	3.469	3.504	3.539	3.574	3.610	3.610
			- Kelapa (kg/ha/th kopra)	1.415	1.403	1.445	1.460	1.475	1.475
			- Karet (kg/ha/th karet Kering)	1.216	1.220	1.225	1.230	1.235	1.235
			- Sagu (kg/ha/th tepung sagu)	6.390	6.395	6.400	6.405	6.410	6.410
		Meningkatnya perizinan usaha	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	60,72	63,76	66,95	70,30	73,81	73,81
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,3%	0,3 %
		Meningkatnya kompetensi SDM perkebunan	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	0,01 %	0,01 %	1,78 %	1,96 %	2,15 %	2,15 %

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

I. Terwujudnya peningkatan kinerja OPD

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

➤ Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

II. Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan

- Meningkatnya sarana produksi pengembangan perkebunan

➤ Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan.

Formulasi Perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan tahun berkenaan

- Meningkatnya Prasarana produksi pengembangan perkebunan

➤ Jumlah produktivitas komoditas utama tanaman perkebunan

Formulasi Perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan

- Meningkatnya perizinan usaha perkebunan

➤ Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin

Formulasi Perhitungan : Total luas data IUP Stratnas PK (Pengendalian Korupsi) dibagi dengan total luas kebun kelapa sawit data Statistik perkebunan dikali seratus

- Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan

- Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana

Formulasi Perhitungan : Luas lahan perkebunan yang dikendalikan dibagi dengan luas lahan yang terkena bencana pada tahun berkenaan dikali seratus

- Meningkatnya Kompetensi SDM perkebunan

- Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya

Formulasi Perhitungan : Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sampai dengan tahun berkenaan dibagi jumlah petani perkebunan yang ada dalam simluhtan dikali seratus

3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan sub sektor perkebunan, Dinas Perkebunan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan pemetaan program dan kegiatan/sub kegiatan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan, sesuai RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2019-2024 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

❖ Program Bidang Pertanian sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 khusus untuk perkebunan sebagai berikut :

➤ Program penunjang urusan pemerintahan, 7 kegiatan dengan 11 sub kegiatan, yaitu :

1. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan bahan logistik kantor

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Program Urusan terdapat 5 program, 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan yaitu :
1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
- 1.1 Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- Sub Kegiatan :
- a. Pengawasan Sebaran Pupuk , Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung pertanian
- 1.2 Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Sub Kegiatan :
- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - b. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

2.1 Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

3. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.1 Kegiatan : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

4.1 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

5.1 Kegiatan : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
- b. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian

5.2 Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

5.3 Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Wawasan

Sub Kegiatan :

- a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan Koorporasi Petani

➤ **UPT PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN**

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1.1 Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan

➤ **UPT PRODUKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN**

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1.1 Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Perkebunan diantaranya yaitu pagu anggaran berdasarkan RPJMD dan Renstra jauh dari yang diharapkan karena dalam penyusunan RPJMD dan Renstra waktu itu Sub Sektor Perkebunan masih bergabung dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan belum berdiri sendiri menjadi Dinas Perkebunan, sehingga kegiatan yang muncul hasil dari pencermatan Bappeda hanya mewakili 1 bidang saja yaitu bidang produksi, sedangkan setelah Dinas Perkebunan berdiri sendiri terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat serta 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pagu anggaran Dinas Perkebunan sangat kecil maka perlu adanya perubahan/penambahan anggaran pada kegiatan/sub kegiatan dengan melakukan revisi Renstra.

Adapun rincian rencana kegiatan tiap program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan perkebunan antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Kabupaten / Kota Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel.6 (T-C.33).



TABEL 6 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
ANTARA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU DAN KABUPATEN / KOTA
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	100 persen	25,550,718,878	(Pendapatan Asli Daerah) PAD		100 persen	28,105,790,766.24
3	27	01	1	02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		5 Laporan	19,313,197,850			5 Laporan	21,244,517,635.00
3	27	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		103 orang/bulan	19,313,197,850			103 orang/bulan	21,244,517,635.00
3	27	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	7 Laporan	48,273,750			7 Laporan	53,101,125.00
3	27	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		7 Laporan	48,273,750			7 Laporan	53,101,125.00
3	27	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	1 Laporan	-			1 Laporan	0.00
3	27	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0	-			0	0.00
3	27	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	5 Jenis Layanan	1,685,170,352			5 Jenis Layanan	1,853,687,387.20
3	27	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 paket	185,327,585			15 paket	203,860,343.50
3	27	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25 paket	360,000,000			35 paket	396,000,000.00
3	27	01	1	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket	162,018,826			3 paket	178,220,708.60
3	27	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		28 paket	87,545,441			28 paket	96,299,985.10
3	27	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 laporan	890,278,500			200 laporan	979,306,350.00
3	27	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	38 Unit	626,044,105			38 Unit	688,648,515.94
3	27	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		35 Unit	626,044,105.40			38 Unit	688,648,515.94
3	27	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	3 Laporan	2,853,366,007			3 Laporan	3,138,702,607.70
3	27	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 Laporan	12,500,000			100 Laporan	13,750,000.00
3	27	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	435,619,956			12 Laporan	479,181,951.60
3	27	01	1	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2,405,246,051			924 Laporan	2,645,770,656.10
3	27	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	35 Unit	1,024,666,814			35 Unit	1,127,133,495.40
3	27	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		13 Unit	417,610,000			13 Unit	459,371,000.00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6		7	8	9
3	27	01	1	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	54,380,000			15 Unit	59,818,000.00
3	27	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit	552,676,814			7 Unit	607,944,495.40
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan		8.822.314 ton	5,478,163,153	(Pendapatan Asli Daerah) PAD		8.822.314 ton	6,025,979,468.30
3	27	02	1	01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)		75 Ha	166,048,860			75 Ha	182,653,746.00
3	27	02	1	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		1 Laporan	166,048,860			1 Laporan	182,097,720.00
3	27	02	1	02		Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah bibit perkebunan		225.000 Bibit	5,312,114,293			225.000 Bibit	5,843,325,722.30
3	27	02	1	02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan)	Jumlah Sertifikat Benih		12,5 juta Sertifikat	427,283,620			12,5 juta Sertifikat	480,000,000
3	27	02	1	02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Bidang Disbun)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		1 Laporan	2,754,830,468.00			1 Laporan	3,030,313,514.80
3	27	02	1	02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		1 Laporan	2,130,000,205			1 Laporan	2,343,000,225.50
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan	Provinsi Riau	12.73 kg/ha/th	9,837,416,517	(Pendapatan Asli Daerah) PAD		12.73 kg/ha/th	10,821,158,168.70
3	27	03	1	01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang ditanam		290 Ha	9,837,416,517			290 Ha	10,821,158,168.70
3	27	03	1	01	02	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		100 Dokumen	-			100 Dokumen	0.00
3	27	03	1	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		7 Dokumen	6,327,524,937			7 Dokumen	6,960,277,430.70
3	27	03	1	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		7 Dokumen	1,782,623,860			6 Dokumen	1,960,886,246.00
3	27	03	1	01	09	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 laporan	1,727,267,720			1 laporan	1,899,994,492.00

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6		7	8	9
3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	Provinsi Riau	0,3 Persen	647,536,250	(Pendapatan Asli Daerah) PAD		0,3 Persen	712,289,875.00
3	27	05	1	01		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas lahan yang dikendalikan		100 Ha	647,536,250			140 Ha	712,289,875.00
3	27	05	1	01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan		100 Ha	131,310,000			100 Ha	144,441,000.00
3	27	05	1	01		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan penanganan kebakaran lahan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan		40 Ha	516,226,250			40 Ha	567,848,875.00
3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	Provinsi Riau	73.81 Ha	749,216,000	(Pendapatan Asli Daerah) PAD		73.81 Ha	824,137,600.00
3	27	06	1	01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan		12 perusahaan	749,216,000			1 Laporan	824,137,600.00
3	27	06	1	01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlahizin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		1 Laporan	749,216,000			1 Laporan	824,137,600.00
3	27	07				PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	Provinsi Riau	2.15 persen	775,001,390	(Pendapatan Asli Daerah) PAD		2.15 persen	852,501,529.22
3	27	07	1	01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya		140 Orang	211,695,760			140 Orang	232,865,336.00
3	27	07	1	01	01	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan		50 Orang	135,453,890			20 Orang	148,999,279.00
3	27	07	1	01	02	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah penyuluhan pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi		120 unit	76,241,870			120 Orang	83,866,057.00
3	27	07	1	02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi		5 Kelompok	118,899,980			5 Kelompok	130,789,978.00
3	27	07	1	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi Informasi Teknis Sosial ekonomi dan inovasi pertanian		0	-			0	0.00
3	27	07	1	02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan		4 Kelompok	118,899,980			4 Kelompok	130,789,978.00
3	27	07	1	03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi yang mendapat pembinaan manajemen		10 Unit	444,405,650			10 Unit	488,846,215.22
3	27	07	1	03	02	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi		10 Unit	444,405,650.20			10 Unit	488,846,215.22
TOTAL										43,038,052,189				47,341,857,407.46

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV

- Pendanaan indikatif pembangunan perkebunan yang ada pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan Bappedalitbang sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024, dan usulan dari DPRD Provinsi Riau
- Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024 sesuai renstra memiliki total anggaran sebesar Rp 37.400.132.962,- (Tiga Puluh tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
- Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024 dengan mengacu pada Surat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDALITBANG-1/12/12 Tentang Penyesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2023 memiliki total anggaran sebesar Rp. 43.038.052.189; (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri yang terdiri atas :
 - ✓ Belanja Pegawai sebesar Rp. 19.313.197.851,-
(Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)
 - ✓ Belanja Pembangunan sebesar Rp. 23.724.854.338,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 25.550.718.878,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Delapan Rupiah)
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 5.478.163.153 ,- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 9.587.416.517 ,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Enam Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah)
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 647,536,250,- (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 749,216,000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
- Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 775,001,390,20 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Koma Dua Puluh Rupiah)

Adapun rincian anggaran untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah terinput pada aplikasi SIPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

PENUTUP

BAB V

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2019-2024 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan perkebunan. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan, Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah tahun 2024 guna merumuskan perencanaan tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang berpedoman dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.



Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang merupakan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan karena banyaknya tanaman tua rusak, penggunaan bahan tanaman yang tidak bermutu dan bersertifikat, pemupukan yang tidak sesuai rekomendasi, penanganan pasca panen yang belum memadai serta lemahnya kelembagaan petani.
2. Terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pemasaran seperti jalan produksi serta terbatasnya akses permodalan petani.
3. Rendahnya produksi tanaman perkebunan karena penggunaan bahan tanaman (benih) yang tidak bermutu / unggul, gangguan hama penyakit, anomaly cuaca, kebakaran lahan dan kebun serta banjir.
4. Mutu produk tanaman perkebunan yang masih rendah (belum memenuhi standar) dan harga produk tanaman perkebunan yang masih rendah pada tingkat petani.
5. Rendahnya harga komoditi perkebunan terutama karet dan kelapa yang diterima petani disebabkan karena panjangnya mata rantai perdagangan dengan system ijon dan tengkulak serta belum adanya register Pedagang pengumpul / pembeli Bokar (Karet) oleh Dinas Disperindag Kabupaten/Kota sebagaimana Permendag no 53 Tahun 2009.
6. Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan atau sudah memiliki IUP tapi belum memiliki HGU.

7. Kurangnya jaminan pelaku usaha perkebunan karena tidak adanya kepastian hukum atas suatu lahan.
8. Terbatasnya persediaan benih unggul bersertifikat tanaman perkebunan di Provinsi Riau.

Kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 yang dilaksanakan antara lain :

1. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 ini untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Bidang /UPT lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan perkebunan sesuai dengan program/kegiatan Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas



Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024, Dinas Perkebunan berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan

Sedangkan rencana tindak lanjut Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 yang dilaksanakan antara lain

1. Meningkatkan produktivitas perkebunan melalui upaya peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, rekomendasi pemupukan, memperkuat kelembagaan petani serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan petani.
2. Membuka akses bagi pemasaran hasil produksi perkebunan dengan membangun jalan produksi
3. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dengan menggunakan bahan tanaman (benih) unggul bersertifikat, penggunaan lahan yang optimal (jumlah tanaman per Ha), pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan, penggunaan pupuk yang tepat, perbaikan saluran drainase serta mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan kebun serta gangguan bencana alam lainnya.
4. Meningkatkan mutu produk perkebunan dengan memberikan bimbingan teknis pengolahan, sosialisasi peraturan tentang mutu produk perkebunan dan pemberian bantuan alat pengolahan. Dengan meningkatnya mutu produk perkebunan maka diharapkan harga yang diterima petani pun meningkat sehingga menambah pendapatan petani.



5. Memutus mata rantai pedagang tengkulak / ijon dan Dinas Perindag Kabupaten/Kota melakukan register terhadap pedagang pengumpul / pembeli karet (Bahan Olahan Karet (Bokar)) petani
6. Peningkatan upaya penertiban perizinan perkebunan serta pembinaan dan monitoring pelaku usaha perkebunan
7. Percepatan penyelesaian Perubahan RTRW Propinsi Riau
8. Promosi untuk menarik minat investor membangun industri hilir perkebunan di Provinsi Riau
9. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan wawasan SDM perkebunan melalui pendidikan dan latihan, kursus kursus teknis fungsional, magang dan lain-lain secara terprogram dan berkesinambungan.
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perbankan dan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota agar memperoleh jalan keluar yang terbaik untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit permodalan pembangunan /peremajaan kebun program revitalisasi.
11. Membangun kebun sumber benih tanaman perkebunan pada setiap daerah pengembangan tanaman perkebunan

Rencana Kerja tahun 2024 ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan perkebunan harus dilakukan lebih intensif di dalam koordinasi antar instansi yang

terkait agar hasil pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi petani juga memberikan manfaat untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif. Selanjutnya, agar masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan perencanaan yang telah disusun secara bersama, maka proses perencanaan dilakukan dengan menghimpun usulan dan masukan dari masyarakat Provinsi Riau secara bertahap dan berjenjang.

Pekanbaru,

2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU



Ir. ZULFADLI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660803 199211 1 001





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Telp/Fax (0761) 47153

PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts.188 /Disbun-Sekr/346

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2024

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 137 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Mengingat :
- 1. Undang undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
 - 2. Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritnah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817);
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI tahun 2018 nomor 2, Tambahan lembaran negara RI Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2017 Nomor 12) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau;
17. Peraturan Gubernur Riau No Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Riau
18. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

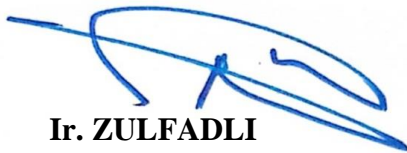
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2024 DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

- PERTAMA** : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Riau ini.
- KEDUA** : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas
dan tanggung jawab untuk menyusun Dokumen Perencanaan (RENJA
PD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024
- KETIGA** : Tim Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 Dinas
Perkebunan Provinsi Riau menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
Perkebunan Provinsi Riau
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan
ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**



Ir. ZULFADLI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660803 199211 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
di Pekanbaru
3. Kepala Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 188/Disbun-Sekr/346
Tanggal : Januari 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU**

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	KETUA
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3.	Sub Koordinator Perencana	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Produksi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Anggota
8.	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Anggota
9.	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Anggota
10.	Fungsional Perencana	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**



**Ir. ZULFADLI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660803 199211 1 001**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN						40.480.768.363,60							46.113.819.136,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						40.480.768.363,60							46.113.819.136,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						40.480.768.363,60							46.113.819.136,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang perkebunan	-			100 Persen	25.550.718.878,40						-	29.910.319.136,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	-			5 Laporan	19.313.197.850,00			-	-	-	-	21.244.517.636,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103.00 Orang/ Bulan	19.313.197.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.244.517.636,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola	-			7 Laporan	48.273.750,00			-	-	-	-	70.801.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7.00 Laporan	48.273.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.801.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang Dipenuhi	-			5 Jenis layanan	1.685.170.352,00			-	-	-	-	2.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	185.327.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	162.018.826,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				28.00 Paket	87.545.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	890.278.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-			38 Unit	626.044.105,40			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	626.044.105,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan	2.853.366.007,00			-	-	-	-	3.415.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.00 Laporan	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	435.619.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	2.405.246.051,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-			35 Unit	1.024.666.814,00			-	-	-	-	1.580.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13.00 Unit	417.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15.00 Unit	54.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7.00 Unit	552.676.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi komoditas utama perkebunan	-			8.822.314 Ton	2.920.879.328,00						-	3.200.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)	-			75 Ha	166.048.860,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.00 Laporan	166.048.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah bibit perkebunan	-			225000 Bibit	2.754.830.468,00			-	-	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1.00 laporan	2.754.830.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas komoditas utama perkebunan Jumlah Produktivitas komoditas utama perkebunan	-			12,730 Kg/Ha/Th 12,73 Kg/Ha/Th	9.837.416.517,00						-	10.800.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang ditanam	-			290 Ha	9.837.416.517,00			-	-	-	-	10.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				7.00 Dokumen	6.327.524.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				7.00 Dokumen	1.782.623.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1.00 Laporan	1.727.267.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	-			0,30 Persen	647.536.250,00						-	700.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas lahan yang dikendalikan	-			100 Ha	647.536.250,00			-	-	-	-	700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100.00 Ha	131.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				40.00 Ha	516.226.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	-			73,81 Persen	749.216.000,00						-	503.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan	-			12 Perusahaan	749.216.000,00			-	-	-	-	503.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1.00 Laporan	749.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		503.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	-			2,15 Persen	775.001.390,20						-	1.000.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya	-			140 Orang	211.695.760,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				120.00 Unit	76.241.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				50.00 Orang	135.453.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi	-			5 Kelompok	118.899.980,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				4.00 Kelompok	118.899.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi yang mendapat pembinaan manajemen	-			10 Unit	444.405.650,20			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				10.00 Unit	444.405.650,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN						2.130.000.205,00						2.300.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.130.000.205,00							2.300.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.130.000.205,00							2.300.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi komoditas utama perkebunan	-			8.822.314 Ton	2.130.000.205,00						-	2.300.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah bibit perkebunan	-			225000 Bibit	2.130.000.205,00			-	-	-	-	2.300.000.000,00	UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1.00 laporan	2.130.000.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.300.000.000,00	UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
		UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN						427.283.620,00							480.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						427.283.620,00							480.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						427.283.620,00							480.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi komoditas utama perkebunan	-			8.822.314 Ton	427.283.620,00						-	480.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah bibit perkebunan	-			225000 Bibit	427.283.620,00			-	-	-	-	480.000.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				12500000.00 Sertifikat	427.283.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.000.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
	J U M L A H							43.038.052.188,60							48.893.819.136,00	